



Laporan KEUANGAN Audited BPSIP BANTEN

Bagian Anggaran 018.09.2900

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2023



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
Jl. Raya Ciptayasa KM.01 Ciruas, Serang – Banten
(0254) 281055 fax (0254) 282507

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 19730611206042017

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	14
B.2. Belanja.....	15
B.3. Belanja Pegawai.....	16
B.4. Belanja Barang.....	17
B.5. Belanja Modal.....	18
B.5.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	19
C.1. Aset Lancar.....	19
C.1.1. Persediaan.....	19
C.2. Aset Tetap.....	19
C.2.1. Tanah.....	19
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	19
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	21
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	21
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	21
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	21
C.3. Aset Lainnya.....	22
C.3.1. Aset Lain-lain.....	22
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	23
C.4. Ekuitas.....	23
C.4.1. Ekuitas.....	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	24
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	24
D.2. Beban Pegawai.....	24
D.3. Beban Persediaan.....	25
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	26
D.5. Beban Pemeliharaan.....	26
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	27
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	27
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	28

E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1.	Ekuitas Awal.....	28
E.2.	Surplus/Defisit-LO.....	29
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	29
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	29
E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	29
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	29
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	29
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	30
E.5.	Ekuitas Akhir.....	30
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	31
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	31
F.2.	Pengungkapan Lain Lain.....	31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Istiqbal Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp203,573,500 atau mencapai 122.34% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp166,400,000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp7,062,181,018,- atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp7,2,291,671,-

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp28,943,165,195,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp28,933,240,750; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9,924,445.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp28,943,165,195,-

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp196,292,200, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7,807,640,690 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7,611,348,490. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp7,281,300 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7,604,067,190,-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp29,688,624,867 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7,604,067,190 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6,858,607,518 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp29,943,165,195.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	166,400,000	203,573,500	122	462,719,759
Jumlah Pendapatan		166,400,000	203,573,500	122	462,719,759
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2,842,133,000	2,822,164,260	99	3,772,890,580.00
Belanja Barang	B.4.	4,350,438,000	4,141,466,758	95	3,261,117,924.00
Belanja Modal	B.5.	99,100,000	98,550,000	99	99,375,000.00
Jumlah Belanja		7,291,671,000	7,062,181,018	97	7,133,383,504.00

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.		347,000
Jumlah Aset Lancar			347,000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	15,124,896,000	15,124,896,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10,921,213,626	11,260,088,055.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15,475,031,427	15,475,031,427.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	758,963,330	758,963,330.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	55,000,000	55,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(13,401,863,633)	-12,187,800,089.00
Jumlah Aset Tetap		28,933,240,750	30,486,178,723.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	241,224,156	922,169,227.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(231,299,711)	-846,055,590.00
Jumlah Aset Lainnya		9,924,445	76,113,637.00
Jumlah Aset		28,943,165,195	30,564,253,760.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.3.1	28,943,165,195	30,564,253,760.00
Jumlah Ekuitas		28,943,165,195	30,564,253,760.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		28,943,165,195	30,564,253,760.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	196,292,200	242,563,359.00
JUMLAH PENDAPATAN		196,292,200	242,563,359.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,822,164,260	3,772,890,580.00
Beban Persediaan	D.3.	60,725,700	508,822,400.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,709,947,448	1,841,678,380.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	567,393,044	545,419,334.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	803,747,566	366,812,210.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	843,662,672	971,589,493.00
JUMLAH BEBAN		7,807,640,690	8,007,163,897.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,611,348,490)	-7,764,600,538.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.		87,321,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.		1,800,000.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	7,281,300	132,835,400.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.		.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7,281,300	218,356,400.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		(7,604,067,190)	-7,546,244,138.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	29,688,624,867	30,564,253,760.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7,604,067,190	-7,546,244,138.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.		-48,500.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.		0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.		0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.		0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6,858,607,518	6,670,663,745.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-745,459,672	-875,628,893.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	28,943,165,195	29,688,624,867.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagasesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jl. Raya Ciptayasa KM 01 Ciruas – Serang, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bantenmelakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	158,600,000	158,600,000
Jumlah Pendapatan	158,600,000	158,600,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,252,587,000	2,766,518,000
Belanja Lembur	29,375,000	75,615,000
Belanja Barang Operasional	1,300,328,000	1,274,716,000
Belanja Barang Non Operasional	133,050,000	1,152,053,000
Belanja Barang Persediaan	170,641,000	65,925,000
Belanja Jasa	301,900,000	387,706,000
Belanja Pemeliharaan	481,872,000	568,318,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	308,950,000	901,720,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	99,100,000
Jumlah Belanja	5,978,703,000	7,291,671,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp462,719,759.00 atau mencapai 223% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp207,800,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7,800,000	89,337,700	1,145.36
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	158,600,000	106,954,500	67.74

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan lain-lain		7,281,300	
Jumlah	166,400,000	203,573,500	122.34

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 101% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	89,337,700	132,650,400.00	413.68
Pendapatan Lain-Lain	7,281,300	185,000.00	(98.46)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	106,954,500	234,671,900.00	43.95
Jumlah	203,573,500	462,719,759.00	130.41

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp7,062,181,018 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp7,291,671,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2,842,133,000	2,822,164,795	99,3
Belanja Barang	4,350,438,000	4,141,466,758	95,2
Belanja Modal	99,100,000	98,550,000	99,45
Total Belanja Kotor	7,405,269,000.00	7,062,181,553	96.52
Pengembalian Belanja		-535	0.00
Total Belanja	7,405,269,000.00	7,133,383,504.00	96.85

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar -24.61% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	2,822,164,260	3,772,890,580.00	(10.86)
Belanja Barang	4,141,466,758	3,261,117,924.00	(40.70)
Belanja Modal	98,550,000	99,375,000.00	8.81
Total Belanja	7,062,181,018	7,405,269,000.00	(24.61)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,822,164,260 dan Rp3,772,890,580 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -1.86 dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa pegawai yang naik pangkat

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,748,821,795	3,640,822,026.00	(11.69)
Belanja Lembur	73,343,000	132,439,000.00	16.22
Jumlah Belanja Kotor	2,822,164,795	3,773,261,026.00	(10.94)
Pengembalian Belanja Pegawai	535	-370,446.00	(90.68)
Jumlah Belanja	2,822,164,260	3,772,890,580.00	(10.86)

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,141,166,758 dan Rp3,261,117,924. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 30.70% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan adanya revisi anggaran pada awal tahun

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,271,719,718	1,149,004,866.00	12.16
Belanja Barang Non Operasional	1,070,690,962	394,901,555.00	(71.81)
Belanja Barang Persediaan	60,378,700	464,172,500.00	(32.20)
Belanja Jasa	367,536,768	297,771,959.00	(33.72)
Belanja Pemeliharaan	567,393,044	588,454,834,.00	27.55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	803,747,566	366,812,210.00	(58.28)
Jumlah Belanja Kotor	4,141,466,758	3,315,954,000.00	(39.70)
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	
Jumlah Belanja	4,141,466,758	3,315,954,000.00	(39.70)

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98,100,000 dan Rp99,375,000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 8.81% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98,100,000	99,375,000	8.81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	
Jumlah Belanja Kotor	98,100,000	99,375,000	8.81
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Belanja	98,100,000	99,375,000	8.81

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp98,100,000 dan

Rp99,375,000.00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Ada anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98,100,000	99,375,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	99,375,000	99,375,000	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	99,375,000.00	99,375,000	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp347,000.00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0,00	347,000.00
Bahan Baku		
Jumlah	0,00	347,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15,124,896,000.00 dan Rp15,124,896,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10,921,213,626 dan Rp11,479,696,834. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	11,479,696,835
Mutasi Tambah	
Pembelian	98.100.000.00
Reklasifikasi Masuk	107,900,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-85,932,000.00

Saldo per 31 Desember 2023	11,479,696,834.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-764,933,208
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10,921,213,626

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp.764.933.208 berasal dari:

No	Nama Barang	Nilai
1	Mesin Pompa Air PMK	3.530.000
2	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	168.090.000
3	Alat Panen Lainnya	451.428.000
4	Mesin ketik manual standar (14-16 inci)	5.989.500
5	loudspeaker	17.000.000
6	wireless	1.162.000
7	meghaphone	900.000
8	Handy talky (HT))	6.800.000
9	Aalat Kominukasi Telephone lainnya	10.400.000
10	Kursi dorong	767.000
11	Utility trolly	3.640.000
12	Uninterupted Power Supply (UPS)	900.000
13	P.C Unit	65.722.708
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28.604.000
	Jumlah	764.933.208

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp.206.450.000 berasal dari :

No	Nama Barang	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	107.900.000
2	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya	28.050.000
3	Mesin Pengayak	6.750.000
4	Lemari Pengering Botol	7.900.000
5	Mesin Pengering	8.950.000
6	Extruder (Alat Laboratorium Pertanian)	34.950.000
7	Disk Mill	11.950.000

	Jumlah	206.450.000
--	--------	-------------

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15475,031,427 dan Rp15,475,031,427 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15,475,031,427.00
Mutasi Tambah	
-	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	15,475,031,427.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.758,963,330 dan Rp758,963,330.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp55,000,000.00 dan Rp55,000,000.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,401,863,633 dan Rp.-13,220,006,993.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10,921,213,626	-10,763,323,199.00	157,890,427.00
2.	Gedung dan Bangunan	15,475,031,427	-2,542,941,298	12,932,090,129.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	758,963,330	-328,977,001	429,986,329.00
4.	Aset Tetap Lainnya	55,000,000		55,000,000.00
	Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	241,224,156	-231,299,711	9,924,445.00
Akumulasi Penyusutan		27,451,432,539	-13,866,541,209	13,584,891,330.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp241,224,156 dan Rp95,808,948. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	95,808,9548
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	145,415,208
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Saldo per 31 Desember 2023	241,224,156
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-23,1,299,711
Nilai Buku per 31 Desember 2022	9,924,445

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-231,299,711 dan Rp-81,111,679.00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	241,224,156	231,299,711	9,924,445
Akumulasi Penyusutan		241,224,156	-231,299,711	9,924,445

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28,943,165,195 dan Rp29,688,624,8670. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp196.292.200 dan Rp242.563.359. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	106,954,500	234,671,000	-54.42
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,425,000	7,175,000	3.48
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	81,912,700	700,000	11,601.81
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7,425,000	17,359	42,673.20
Jumlah	196,292,200	242,563,359	-54.42

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,822,164,260 dan Rp3,772,890,580. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,375,503,800.00	2,663,089,900.00	(10.80)
Beban Pembulatan Gaji PNS	39,764.00	39,529.00	0.59
Beban Tunj. Anak PNS	51,644,888.00	54,691,658.00	(5.57)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	144,333,060.00	159,468,840.00	(9.49)
Beban Tunj. Fungsional PNS	496,410,000.00	587,970,000.00	(15.57)
Beban Tunj. PPh PNS	25,218,554.00	29,460,089.00	(14.40)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000.00	25,200,000.00	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	169,828,960.00	188,800,200.00	(10.05)
Beban Tunjangan Umum PNS	32,240,000.00	38,355,000.00	(15.94)
Beban Uang Lembur	132,439,000.00	113,959,000.00	16.22
Beban Uang Makan PNS	320,403,000.00	371,562,000.00	(13.77)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-446	0,00	-
Jumlah	2,822,164,260	3,772,890,580	-25.20

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp60,725,700 dan Rp508,822,400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku		192,600.00	-100
Beban Persediaan konsumsi	60,725,700	508,629,800.00	-88.06
Jumlah	60,725,700	508,822,400.00	-88,07

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,709,947,448 dan Rp1,841,678,380. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	967,796,837	118,000,000.00	(31.46)
Beban Penamnah Daya Tahan Tubuh	24,732,405	0.00	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	102,894,125	276,900,755.00	(22.84)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		5,400,000.00	(10.00)
Beban Barang Operasional Lainnya	70,000,000	0.00	(100.00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105,640,000	125,860,000.00	(2.63)
Beban Sewa	8,000,000	0.00	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		1,645,000.00	(98.38)
Beban Jasa Konsultan	31,375,000	17,000,000.00	(29.17)
Beban Jasa Profesi	99,235,750	14,700,000.00	(60.80)
Beban Keperluan Perkantoran	1,071,347,313	1,017,744,866.00	15.04
Beban Langganan Listrik	224,908,986	260,443,187.00	(7.66)
Beban Langganan Telepon	4,017,032	3,983,772.00	(1.00)
Jumlah	2,709,947,448	1,841,678,380.00	(35.93)

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp567,393,044 dan Rp545,419,334. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297,856,470	313,471,120.00	44.05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		269,536,574	(4.83)
Jumlah	567,393,044	545,419,334	9.24

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.803,747,566 dan Rp366,982,210. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	488,317,566	270,527,210.00	(32)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		0.00	(100)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	179,010,000	65,485,000.00	(48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	136,420,000	30,800,000.00	0
Jumlah	803,747,566	366,812,210.00	(58)

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp843,662,672 dan Rp971,589,493. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	391,404,496	391,404,496.00	-
Beban Penyusutan Irigasi	10,436,056	10,436,056.00	-
Beban Penyusutan Jaringan	13,393,953	13,393,952.00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,772,824	17,456,618.00	-72.66
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	423,655,343	538,898,371.00	-21.38
Jumlah	843,662,672	971,589,493	-13.17

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset		1,800,000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		87,321,000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7,281,300	132,835,400	-94.52
Jumlah	7,281,300	218,356,400	-96.67

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29,688,624,867 dan Rp30,564,253,760.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-7,546,244,138 dan Rp-10,689,218,161.00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp48,500.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6,858,607,518 dan Rp6,670,663,745 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,062,181,018
Diterima dari Entitas Lain	-203,573,500
Jumlah	6,858,607,518

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28,943,165,195 dan Rp29,688,624,867.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak ada penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya